

TREN ANGKA PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

THE TREND OF JUNIOR HIGH SCHOOL DROPOUT RATES IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Siti Nur Qoniah Ariyani

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta.

onik.aryani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui tren angka putus sekolah tingkat SMP di DIY; 2. Mengetahui Kebijakan dan program yang dilakukan Pemerintah DIY dalam mengurangi dan memberdayakan angka putus sekolah; Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif data sekunder. Data berasal dari Dinas Pendidikan DIY dan Seluruh Dinas Pendidikan Kab/Kota yang ada di DIY. Analisis data menggunakan Analisis Tren dengan persamaan $Y' = a + bX$. Hasil penelitian adalah: 1. APtS Tingkat SMP untuk 5 Kabupaten/Kota di DIY sebagai berikut : APtS Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo sudah mencapai 0,00% pada tahun 2018. APtS Tingkat SMP Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul angka putus sekolah tingkat SMP belum mencapai angka 0% pada tahun 2018; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota menjalankan kebijakan dan program yaitu Jaminan Pendidikan Daerah KMS, Beasiswa Retrieval, BOS, PIP, kerjasama dengan kemitraan lembaga, penguatan pemberdayaan anak putus sekolah melalui pendidikan non formal.

Kata Kunci : *Tren, Angka Putus Sekolah, SMP, DIY*

Abstract

This research aims to : 1. Knowing the trend of Junior High School dropout rates in DIY; 2. Knowing the policies and programs undertaken by the DIY government in reducing the dropout rates. This research used a descriptive quantitative method of secondary data. The data were collected from the DIY education service and the education service of districts in DIY. The data analysis used trend analysis with the equation $Y' = a + bX$. The results are : 1. The junior high school drop out rate of Yogyakarta, Sleman district, and Kulon Progo district has reached 0% in 2018. Junior high school drop out rates of Gunungkidul and Bantul districts have not reached the 0% figure in 2018; 2. The local governments implement policies and programs that include KMS Regional Education Guarantees, Retrieval Scholarships, BOS, PIP, cooperation with institutional partnerships, reinforcement of the empowerment through non formal education.

Keywords: *Trend, Drop Out Rate, Junior High School, DIY*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian penting bagi kebutuhan manusia. Sebab, pendidikan bersifat sepanjang hayat (*long life education*) sebagai suatu investasi di masa mendatang yang tak ternilai harganya. Seseorang tanpa memperoleh pendidikan tidak akan merubah pribadi yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Keberhasilan pendidikan yang dimiliki seseorang adalah mampu menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan menjadi salah satu tujuan negara yang sampai saat ini masih menjadi perhatian berbagai kalangan, sehingga wajar jika peran pemerintah sangat diharapkan dalam peningkatan pelayanan pendidikan di sebuah negara. Di Indonesia sendiri pemerintah memiliki hak dan kewajiban atas terselenggaranya pendidikan.

Pemerintah berkewajiban dalam memberikan pelayanan pendidikan dengan kualitas dan kuantitas pendidikan yang memadai sebagai salah satu konsekuensi mewujudkan kesamaan hak bangsa dalam memperoleh pendidikan, tanpa melihat perbedaan latar belakang sosial, dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia membuat program wajib belajar bagi anak usia sekolah pendidikan dasar sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan pendidikan yang

merata dan adil bagi seluruh anak Indonesia. Pendidikan dasar sendiri terbagi menjadi dua jenis yakni Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jenjang pendidikan SMP penting bagi anak usia sekolah di Indonesia karena pendidikan SMP masa kritis bagi pendidikan anak, yang dimana pendidikannya harus disusun secara cermat dan matang sesuai dengan kebutuhan usia mereka.

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah jenjang pendidikan dasar setelah Sekolah Dasar (SD) yang berfungsi untuk mengamalkan dan mempelajari bentuk suatu nilai-nilai baik nilai kebangsaan dan nilai keimanan yang di dalamnya mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki anak dalam menyiapkan fisik dan mental untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat. Pendidikan SMP menjadi program Wajib Belajar 9 tahun yang sudah dicanangkan sejak 9 Mei 1994, dimana melalui program ini diharapkan terwujudnya masyarakat Indonesia minimal memiliki kemampuan dasar yang esensial. Oleh pemerintah, program Wajib Belajar 9 tahun sudah dianggap berhasil dalam proses implementasinya, yang kemudian pemerintah mencanangkan program Wajib Belajar 12 tahun sebagai wujud peningkatan wajib belajar bagi usia sekolah.

Strategi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mendukung perluasan dan pemerataan dalam pelayanan pendidikan bagi usia sekolah sebagai bentuk program implementasi seperti adanya Beasiswa Pendidikan, Penyediaan Dana BOS, KIP, dan sebagainya. Tetapi, menjadi suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini dunia pendidikan masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa dalam hal pemerataan kesempatan dan kualitas pelayanan pendidikan, hal ini dibuktikan

dengan data UNICEF tahun 2016 (Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2017) bahwa 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan. Meskipun hampir seluruh anak usia sekolah 12-15 tahun sudah bersekolah, masih terdapat sebagian anak yang sudah tidak lagi meneruskan pendidikannya atau mengalami putus sekolah.

Dinamika persoalan angka putus sekolah secara umum menjadi perhatian serius oleh pemerintah, salah satunya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui angka putus sekolah dapat mengindikasikan tingkat keberhasilan maupun kegagalan sistem pendidikan menurut jenjangnya, ataupun dapat menggambarkan suatu kemampuan penduduk untuk menyelesaikan pada jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah mencerminkan

jumlah penduduk usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak dapat menamatkan pendidikan di jenjang tertentu. Penyebab putus sekolah sangat beragam dan tergantung dari jenjang sekolah. Beberapa diantaranya adalah rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan orang tua, kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan serta kesulitan dalam mengakses infrastruktur pendidikan (BPS DIY, 2011).

Pada tahun 2016 prosentase jumlah anak putus sekolah di DIY sebesar 0,21% dengan jumlah usia <13, 13-15, >15 tahun sebesar 277 jiwa (Sumber: DIKPORA DIY). Angka putus sekolah di Yogyakarta disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, masalah ekonomi. Pernyataan ini didukung dengan usia sekolah mengalami putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi. *Kedua*, rendahnya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan. Pernyataan ini didukung dengan masih adanya fenomena sosial dimana masih ditemuinya beberapa kelompok masyarakat yang berpikiran bahwa anak perempuan tidak perlu menempuh pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi.

Beberapa permasalahan di atas, menjadi suatu acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan pendidikan pada setiap komponen pendidikan, khususnya memberikan penyadaran kepada para orangtua akan arti penting pendidikan bagi anak. Diperlukan upaya yang signifikan dari

pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat menekan angka putus sekolah hingga 0%. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui beberapa kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah pusat salah satunya bertujuan untuk mencapai pemerataan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik secara nasional, provinsi, maupun daerah-daerah.

Angka putus sekolah pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah menjadi perhatian pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ketika pada tahun 2011 diketahui angka putus sekolah pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di DIY sebesar 178 jiwa dengan jumlah usia <13, 13-15, >15 tahun, hingga sampai saat ini pada data terakhir di tahun 2016, angka putus sekolah pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 0,21% dengan jumlah 237 jiwa (Sumber: DIKPORA DIY). Melihat hal ini peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana prediksi angka putus sekolah pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan Analisis

Tren yang diaplikasikan dalam data sekunder anak putus sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga 5 kabupaten kota DIY.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini berguna untuk mendapatkan sumber informasi pendukung dengan narasumber penelitian yaitu Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon progo. Dengan objek penelitian terkait kebijakan dan program bagi anak putus sekolah yang mempengaruhi tren angka putus sekolah.

Setting dan Waktu Penelitian

Setting penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pendidikan di seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan yaitu pada bulan November-Desember 2017 dan Januari-Februari 2018.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dan wawancara

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara.

Teknik Analisis Data

Peneliti menyajikan data berupa grafik angka putus sekolah pada tingkat SMP di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 5 Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui tren angka putus sekolah menggunakan analisis data dengan metode jumlah kuadrat terkecil (*Least Square Method*). Rumus atau persamaan yang berlaku dalam metode jumlah kuadrat terkecil yaitu

$$Y' = a + bX$$

Keterangan Y' = Tren

a dan b = bilangan konstan

X = Jumlah Tahun

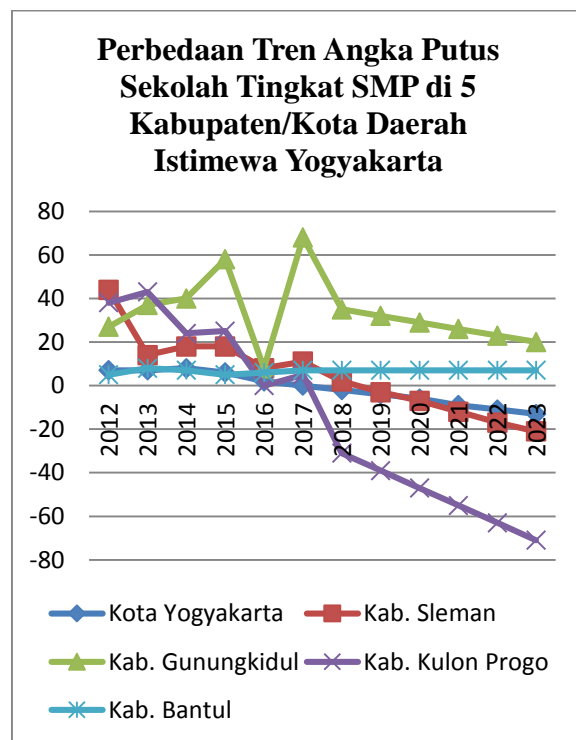
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Analisis Tren Metode Jumlah Kuadrat Kecil, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan 4 Kabupaten/Kota (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul) menggunakan Analisis Tren Metode Jumlah Kuadrat Kecil data Ganjil sedangkan Kabupaten Bantul menggunakan Analisis Tren Metode Jumlah Kuadrat Kecil data Genap, kemudian

analisis dibantu dengan *Microsoft Excel Windows* 2010.

Untuk analisis data hasil wawancara yang digunakan peneliti sebagai pelengkap metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode reduksi, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tren Angka Putus Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta



Gambar 22. Grafik Tren Angka Putus Sekolah Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di 5 Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

Grafik di atas menunjukkan bahwa garis tren angka putus sekolah tingkat SMP di 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perbedaan hasil prediksi tahun ke tahun di masa mendatang. Masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memfokuskan pengurangan angka putus sekolah pada tahun yang berbeda dengan kisaran tahun 2008 sampai dengan 2014. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2017 angka putus sekolah tingkat SMP di Kota Yogyakarta mengalami penurunan hingga mencapai angka 0, kemudian dengan hasil prediksi pada tahun 2018-2023 angka putus sekolah di Kota Yogyakarta mengalami garis tren yang stabil tidak adanya peningkatan di tahun-tahun selanjutnya.

Untuk Kabupaten Sleman grafik di atas melihat bahwa jumlah angka putus sekolah pada tahun 2018-2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2012-2017 dan di tahun 2018-2023 angka putus sekolah di Kabupaten Sleman stabil menurun, garis tren tersebut disebut garis tren negative atau garis kecenderungan menurun. Hal tersebut menunjukkan angka putus sekolah turun, maka banyak anak usia SMP yang bersekolah.

Pada Kabupaten Kulon Progo dari grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018-2023 sudah mencapai penurunan angka putus sekolah tingkat SMP dengan menampakkan gejala perkembangan APtS tingkat SMP

menurun, angka putus sekolah semakin menurun maka penduduk Kabupaten Kulon Progo lebih banyak yang memperoleh pendidikan. Melalui persamaan garis tren dapat dilihat bahwa angka putus sekolah tingkat SMP di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul dimana belum mampu mengungguli Kabupaten lain di DIY, dimana pada Kabupaten Gunungkidul angka putus sekolah untuk tingkat SMP belum mencapai 0% hal ini membuktikan nilai APtS tingkat SMP naik berarti daya serap partisipasi pendidikan usia sekolah SMP di Kabupaten Gunungkidul menurun. Sedangkan di Kabupaten Bantul pada tahun 2018-2023 mendapatkan hasil prediksi angka putus sekolah pada tingkat SMP dengan hasil stagnan, hal ini membuktikan bahwa partisipasi pendidikan anak usia sekolah SMP di Kabupaten Bantul rendah.

Kebijakan dan Program Yang Dilakukan Pemerintah untuk Mengurangi dan Memberdayakan APtS Tingkat SMP di Daerah Istimewa Yogyakarta

Peran serta pemerintah baik pusat ataupun kabupaten/kota dalam bentuk kebijakan dan program sebagai upaya mengurangi angka putus sekolah pendidikan sekolah menengah pertama, merupakan salah satu faktor penentu

keberhasilan dalam pembangunan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah sebagai birokrasi pendidikan secara umum telah

mampu menjalankan wewenang yang dimiliki. Rohman (2014: 165) mengungkapkan bahwa birokrasi pendidikan memiliki wewenang atau kekuasaan administrasi pemerintahan dalam memberikan layanan publik, pengawasan publik, serta pengenalan partisipasi publik dalam bidang pendidikan.

Pemerintah pusat yang dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional melaksanakan kebijakan terkait pengurangan angka putus sekolah, salah satunya kebijakan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan dalam hal ini adalah pemberian bantuan-bantuan dana pendidikan kepada setiap kabupaten/kota antara lain, Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Berdasarkan hasil yang ditemukan bahwa dalam proses pengurangan dan pemberdayaan APtS, Pemerintah di 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan berbagai program dan kegiatan demi pemerataan kesempatan pendidikan bagi anak usia sekolah menengah pertama di daerahnya masing-masing. Berikut akan dikemukakan pembahasan penelitian kebijakan dan program pengurangan dan pemberdayaan APtS tingkat SMP di DIY :

a. Kota Yogyakarta

Tabel 26. Kebijakan dan Program di Kota Yogyakarta

Kebijakan	Program	Kegiatan
Perwal Yogyakarta Nomor 4	Beasiswa Kartu Menuju	Sosialisasi pada wilayah kepada

Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah	Sejahtera (KMS)	masyarakat, dan sekolah Kegiatan monitoring bersamaan dengan program PPDB, proses pembelajaran
Pendidikan Non Formal	(PKBM) (LPK) (PKK) Menjalin mitra dengan Dinas Sosial Pembinaan kepada orangtua	Paket B Pelatihan komputer, memasak, menjahit, dll Bantuan penyediaan lapangan kerja dan sosialisasi motivasi bagi orangtua.

b. Kabupaten Sleman

Tabel 27. Kebijakan dan Program di Kabupaten Sleman

Kebijakan	Program	Kegiatan
Kebijakan Pembiayaan	Beasiswa <i>Retrieval</i> (penarikan kembali)	Sosialisasi kepada sekolah, orangtua, dan media <i>online</i> Kegiatan monitoring melalui penjadwalan, pelaporan, dan kerjasama dengan mitra lain. Peningkatan jumlah guru
Pendidikan Non Formal	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah terkait

		informasi menjadikan PKBM sebagai suatu pilihan bukan alternatif dalam belajar Kejar Paket B
--	--	--

c. Kabupaten Kulon Progo

Tabel 28. Kebijakan dan Program di Kabupaten Kulon Progo

Kebijakan	Program	Kegiatan
Kebijakan Pembiayaan	BOS PBP Beasiswa Miskin	Sosialisasi melalui Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah Monitoring dilakukan dengan Supervisi Sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Masyarakat)
Pendidikan Non Formal	Program Paket B PKH Pengadaan Diklat Guru	

d. Kabupaten Gunungkidul

Tabel 29. Kebijakan dan Program di Kabupaten Gunungkidul

Kebijakan	Program	Kegiatan
Kebijakan Pembiayaan	(PIP) (BOS) (BSM)	Sosialisasi secara <i>top down</i> Monitoring dilakukan melalui <i>database</i> Kerjasama dengan pihak sekolah baik guru dan komite sekolah Membuat slogan dan spanduk di lingkungan sekolah.
Pendidikan Non Formal	PKBM atau SKB disetiap kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial, LPK, dan Lapas.	Kejar Paket B Keterampilan: Memasak, menjahit, menyulam, dan lain.

e. Kabupaten Bantul

Tabel 30. Kebijakan dan Program Kabupaten Bantul

Kebijakan	Program	Kegiatan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016	Program Indonesia Pintar (PIP)	Sosialisasi kepada setiap sekolah di Kabupaten Bantul Kerjasama dengan

		Pemerintah Pusat, Dinas Sosial, dan Perangkat Desa
Pendidikan Non Formal	PKBM dan SKB	Sosialisasi dan monitoring dilakukan dengan mitra yaitu PKKBM, pemerintah desa, sekolah dan Dinas Sosial. Kejar Paket B. Pemberian Keterampilan Pemberian insentif bagi pendidik di Paket B.

Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY Setelah Melihat Hasil Tren APtS Tingkat SMP

Sebuah proses pengambilan kebijakan, setelah hasil estimasi atau prediksi pada suatu keadaan, masalah, atau dampak kebijakan diperoleh. Langkah selanjutnya adalah adopsi atau pengambilan keputusan. Brewer dan de Leon menyebut tahap ini sebagai tahap seleksi yang menekan bahwa seseorang yang dalam hal ini adalah pembuat kebijakan, harus membuat sebuah keputusan. Keputusan dibuat tentu saja dengan mempertimbangkan estimasi atau konsekuensi di masa mendatang sebagai

informasi yang relevan dengan kebijakan dan juga berbagai alternatif yang telah tersedia (Sutjipto, 1987: 32). Keputusan dalam hal ini merupakan sebuah tindak lanjut dari hasil estimasi tren APtS Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil yang ditemukan penyebab dari anak putus sekolah di masing-masing 5 Kabupaten/Kota di DIY yang mempengaruhi tren APtS Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka berbagai tindak lanjut direncanakan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) di DIY sebagai berikut :

Pemerintah Kota Yogyakarta menindaklanjuti hasil tren dari APtS Kota Yogyakarta dengan berencana untuk melakukan penambahan dana pendidikan dan penguatan *parenting* khususnya tingkat SMP di sekolah.

Kabupaten Sleman berencana untuk mengencarkan sosialisasi dan pembentukan paguyuban bagi orangtua/wali siswa di sekolah khususnya tingkat SMP.

Kabupaten Gunungkidul berencana untuk terus mengurangi angka putus sekolah pada usia SMP dengan melakukan pengembalian dan mengoptimalkan program *retrieval*, penguatan *database*, pembentukan satuan kerja dalam bentuk tim untuk menjaring anak putus sekolah di Kabupaten Gunungkidul, mewajibkan anak mengikuti paket B bila tidak

bersekolah di sekolah pendidikan formal, perluasan subsidi beasiswa, hal tersebut juga dengan peningkatan kualitas dan kuantitas bagi guru dan kepala sekolah di lembaga-lembaga formal dan non formal dengan pelatihan diklat, dan pembentukan *parenting*.

Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul berencana untuk terus mengencangkan sosialisasi kepada sekolah dan warga masyarakat untuk memberikan saran bahwa anak yang putus sekolah, rawan putus sekolah agar mengikuti program PKBM atau Paket B. Dengan harapan anak usia sekolah khususnya tingkat SMP harus tetap bersekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tren Angka Putus Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan :

1. APtS Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Yogyakarta diprediksi sudah mencapai 0,00% pada tahun 2018-2023. APtS Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Sleman sudah mencapai 0,00% pada tahun 2019-2023. APtS Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Kulon Progo sudah mencapai 0,00% pada tahun 2018-2023. APtS Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul angka putus sekolah

tingkat SMP belum mencapai angka 0% pada tahun 2018-2023.

2. Kebijakan dan program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) dalam mengurangi dan memberdayakan APtS Pendidikan Sekolah Menengah Pertama antara lain : Mempererat kerjasama dengan kemitraan bagi APtS pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Mengadakan program penguatan data dan penguatan koordinasi antara lembaga-lembaga pendidikan; Memberikan insentif bagi para pendidik PKBM; Memberikan beasiswa-beasiswa bagi anak putus sekolah.

Saran

Sebagai upaya dalam memberi masukan bagi pengambilan kebijakan, maka dari hasil kajian penelitian mengenai tren angka putus sekolah pendidikan sekolah menengah pertama di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah di masing-masing kabupaten/kota terkait pengentasan anak putus sekolah harus terus berlanjut karena dirasakan sangat membantu dalam pengurangan angka putus sekolah.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dari hasil prediksi tren yang menunjukkan

bahwa APtS tingkat SMP Kabupaten Gunungkidul mencapai angka 0% di masa mendatang pada tahun 2023 :

- a. Menggelar Diklat bagi kepala sekolah dan guru dengan konten dan standar yang berbeda.
 - b. Penguatan data APtS dan pembentukan satuan tim kerja penjangkaran anak putus sekolah dilakukan dengan tim koordinasi pendidikan dasar satuan jiwa otonomi daerah.
 - c. Program Paket B. Perlu adanya penambahan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) atau Paket B di berbagai kecamatan daerah Kabupaten Gunungkidul, melihat Kabupaten Gunungkidul sebagai Kabupaten yang terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta Paket B dijadikan tidak sebagai pendidikan alternatif tetapi pilihan bagi anak dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas program Paket B.
 - d. Perluasan Subsidi Beasiswa. Dengan tujuan agar masyarakat bisa mengetahui adanya beasiswa atau bantuan pendidikan bagi mereka yang kurang mampu.
3. Bagi 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan program retrieval yang diselenggarakan di masing-masing Kabupaten/Kota program beasiswa retrieval harus terus berlanjut ada yang dirasakan

dapat membantu bagi anak yang putus sekolah dan kurang mampu.

4. Penguatan program *parenting*. Menggelar program *parenting* dilakukan sesuai dengan prosedur dan konten yang terstandar.
5. Dokumen tentang APtS dilengkapi :
 - a. Dokumen APtS berdasarkan gender dilengkapi.
 - b. Dokumen APtS setiap tahun, bukan hanya 6 tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. (2012). *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2011*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY. Diambil pada tanggal 02 November 2017, dari <http://yogyakarta.bps.go.id>.
- Dinas DIKPORA Daerah Istimewa Yogyakarta. (2016). *Data dan Informasi Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Tahun 2016*. Yogyakarta: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Rohman, Arif. (2012). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. (Mei 2017). *Tingginya Angka Putus Sekolah di Indonesia-CNN Indonesia*. Diambil pada tanggal 02 Desember 2017, dari <http://cpps.ugm.ac.id/tingginya-angka-putus-sekolah/>.

Sutjipto. (1987). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Padang: IKIP Padang.